

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab satu penulis akan membahas mengenai Pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi tujuh sub bab, antara lain sebagai berikut : latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut

### **A. Latar Belakang**

Kaesong adalah sebuah wilayah yang terletak sekitar 10 kilometer dari seberang perbatasan di Korea Utara. Komplek Industri Kaeseong merupakan sebuah proyek kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kawasan industri itu di buka pada tahun 2004 sebagai simbol kerjasama lintas perbatasan dan rekonsiliasi.<sup>1</sup> Simbol kerjasama ini merupakan bagian dari reformasi kebijakan dari Korea Utara oleh Kim Jong-Il (1994-2010) dan Kebijakan *Sunshine Policy* oleh Korea Selatan dibawah kepemimpinan Kim Dae Jung (1998-2003).

Dalam kebijakan *Sunshine Policy* yang diterapkan oleh Presiden Kim pada masa pemerintahannya menerapkan tujuan utama yaitu untuk membangun dan membentuk adanya perdamaian bersama untuk mengendurkan tensi militer dan politik dalam hubungan antara kedua negara Korea ini. Pada kebijakannya tersebut, pemeritah Kim ingin menggunakan

---

<sup>1</sup> Voaindonesia.com, “Korea Selatan Tutup Kawasan Industri Kaesong” diakses pada tanggal 9 November 2016, diakses melalui laman <http://www.voaindonesia.com/a/korea-utara-tutup-kawasan-industri-kaesong/3184674.html>

kebijakan dengan melakukan pemisahan politik dari ekonomi (*Separation of politics from economics*) yang berarti hal ini mendorong adanya pertukaran dan kerjasama di bidang ekonomi tanpa adanya masalah atau campur tangan situasi politik maupun militer yang terjadi.<sup>2</sup> Dan kebijakan tersebut memberikan jalan bagi perusahaan-perusahaan perorangan atau swasta untuk melakukan kerjasama dengan menanamkan modal di Korea Utara dalam sektor-sektor industri yang disediakan.

Proyek kerjasama ekonomi antar Korea ini juga memiliki arti yang penting bagi sejarah Korea karena proyek ini dibuat sebagai puncak dari KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Korea pada tahun 2000 yang untuk pertama kali dilakukan. Yang pada akhirnya Kim Dae-jung dan Kim Jong-il menyetujui dilakukannya kerjasama antar Korea dalam segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya, olahraga, dll.<sup>3</sup> Industri Kaeseong sendiri merupakan sebuah proyek rekonsiliasi antar kedua Korea yang menggabungkan perusahaan dan teknologi canggih dari Korea Selatan dengan lahan serta pekerjanya dari Korea Utara. Kaesong sendiri diharapkan dapat menjadi proyek yang bisa memperbaiki hubungan di Semenanjung Korea. Selain itu, proyek tersebut juga diharapkan dapat menjadi proyek yang mampu menaungi kerjasama antar kedua korea dalam berbagai hal termasuk untuk interaksi pertukaran budaya yang bisa

---

<sup>2</sup> Amelia Fitriani, 2013. "Penerapan The Policy and Prosperity Korea Selatan Terhadap Korea Utara di Bawah Pemerintahan Roh Moo-hyun". *Skripsi*. FISIPOL. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Halaman 3.

<sup>3</sup> Mochtar Mas'ood dan Yang Seung-Yoon. 2005. *Memahami politik korea*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. Halaman 246.

meningkatkan komunikasi di kawasan perbatasan antar Korea dengan tujuan akhir yaitu reunifikasi Semenanjung Korea.

Kaesong bertahan selama 12 tahun menjadi simbol rekonsiliasi. Kawasan Industri Kaesong yang merupakan simbol rekonsiliasi dua negara ini menjadi alasan kuat kerjasama kedua negara semenanjung Korea. Salah satu hal yang membuat kawasan industri ini menarik dunia internasional adalah, Kaesong merupakan bentuk kerjasama dari dua negara yang berkonflik. Namun, dengan adanya konflik diantara kedua Negara itu tidak membuat aktivitas Industri di Kaesong terganggu.

*Tabel 1.1 Catatan penting bagi Proyek Pembangunan Kompleks Industri kotaKaesong Tahun 2000-2004*

<b>Tanggal</b>	<b>Kesepakatan bersama Kompleks Industri Kaesong</b>
22 Agustus 2000	Pencapaian nota kesepahaman tentang pembangunandan pengoperasian kompleks industri kota Kaesong (Hyundai Asan-Komisi Perdamaian Asia Pasifik Chonson, Persatuan Perekonomian Demokrat)
20 November 2002	Pengumuman Undang-Undang Korea Utara tentang Kompleks Industri Korea Selatan di Kota Kaesong
27 Februari 2003	Penetapan perusahaan mitra kerja tahap pertama bagi pembangunan Kompleks Industri kota Kaesong (Oleh Departeen Unifikasi Korea Selatan)
30 Juni 2003	Upacara peletakkan batu pertama bagu pembangunan KIC
18 Mei 2004	Pengumuman pembagian kavling bagi Kompleks Industri percontohan kota Kaesong
30 Juni 2004	Upacara peresmian pembangunan KIC
30 Juni 2004	Produksi Pertama (PT. Living Art, Korea Selatan)

Sumber: Dhietya Prasetya, 2014. "Latar Belakang Pemutusan Hubungan Kerjasama Industri Korea Utara dengan Korea Selatan di Distrik Kaesong". Tesis. UPN "Veteran" Yogyakarta. Halaman 6.

Tabel diatas menyantumkan tahun-tahun yang mencangkup proses perkembangan KIC sejak awal pencapaian kesepakatan tentang pembangunan KIC hingga tahun peresmian dan pembukaan KIC di lahan Korea Utara. Kesepakatan pembangunan KIC dimulai pada tahun 2000 yang kemudian pada tahun berikutnya kedua Korea sepakat untuk melanjutkan proses pembangunan proyek kerjasama tersebut dengan mengumumkan UU tentang kompleks industri di Kaesong, penetapan kavling, penetapan perusahaan mitra kerja pada tahap pertama hingga upacara peresmian dan produksi pertama di KIC.

Pada tahun 2002 disepakati adanya Undang-Undang yang menyangkut tentang Kaesong. Dimana Korea Utara mengumumkan Undang-Undang Khusus tentang Kawasan Industri Kaesong yang mana Kaesong secara resmi menjadi zona ekonomi khusus. Kawasan industri Kaesong mencakup wilayah yang memiliki luas enam puluh enam kilometer persegi dan berada sekitar sepuluh kilometer di utara dari perbatasan Korea.<sup>4</sup> Dari ibu kota Korea Selatan sendiri (Seoul) hanya dibutuhkan sekitar kurang lebih satu jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan untuk mencapai kawasan ini karena terdapat akses jalan langsung maupun akses rel kereta api yang menghubungkan ke daerah ini.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Fajar Pramudito, 2015. "Kebijakan Korea Utara Mengenai Kawasan Industri Kaesong dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Reunifikasi Korea". *Skripsi*. FISIPOL. Universitas Gadjah Mada. Halaman 1

<sup>5</sup> Kompas.com, "Korut tahan satu Pekerja Korsel" diakses pada tanggal 9 November 2016. Diakses melalui laman <http://biz.kompas.com/read/2009/03/31/04404760/korut.tahan.satu.pekerja.korsel>

Gambar 1.1 Peta Komplek Industri Kaesong.



Sumber: <http://www.bbc.com/news/world-asia-35584879>

Pada bulan Agustus tahun 2000 perusahaan Hyundai dari Korea Selatan dan Komisi Perdamaian Asia Pasifik Chonson Korea Utara sepakat untuk memulai sebuah proyek kerjasama industri dengan tujuan untuk menarik investasi perusahaan-perusahaan swasta di Korea Selatan, kerjasama industri ini sendiri dibangun di Kota Kaesong Korea Utara. Proyek industri ini awalnya berupa pabrik pada tanah yang di sewa Hyundai dari Korea Utara untuk jangka waktu 50 Tahun. Kompleks industri percontohan ini akhirnya diresmikan pada tahun 2004.<sup>6</sup> Kaesong sendiri dipilih sebagai lokasi pengembangan kerjasama industri

---

<sup>6</sup> Dhietya Prasetya, 2014. Op.Cit. Halaman 5.

Tujuan dari adanya pembangunan Industri Kaesong ini sendiri sebenarnya adalah untuk mengembangkan kompleks industri di daerah Korea Utara dengan penggabungan antara teknologi dan modal dari Korea Selatan dengan Korea Utara agar dapat bersaing dengan produk dari negara lain. Selain itu, kompleks industri ini ditujukan agar dapat menjadi sebuah simbol dari hubungan kerjasama ekonomi antar Korea serta sebagai rekonsiliasi dan perdamaian antar Korea. Tujuan Industri Kaesong juga ditujukan untuk menjadi kawasan yang diharapkan dapat memblokir penyusupan militer Korut apabila nantinya terjadi perpecahan kembali antara kedua Negara ini.<sup>7</sup>

Hingga tahun 2013 setelah hampir sepuluh tahun beroperasi, KIC mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian Korea Utara. Dengan dibukanya proyek kerjasama antar Korea ini, sekitar 53.000 penduduk Korea Utara mendapatkan pekerjaan di kawasan industri Kaesong dan keseluruhan total upah pekerja Korea Utara langsung disetorkan kepada pemerintah Korea Utara, sebelum akhirnya diberikan kepada para pekerjanya. Keuntungan bagi Korea Utara juga dengan adanya pajak yang diberikan oleh Korea Utara terhadap perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang memiliki perusahaan dan melakukan kegiatan produksi di Kaesong. Keuntungan secara *financial* bagi Utara ini sangat memberikan banyak keuntungan dan juga sangat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Korea Utara. Dengan banyaknya keuntungan yang diberikan oleh aktivitas

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Halaman. 7

di Kaesong, hal ini tentunya akan menarik upaya pemerintah Korea Utara untuk tetap mempertahankan kegiatan industri di kawasan tersebut, dan tentunya Korea Utara akan terus mempertahankan Kaesong sebagai wadah kepentingannya.

*Tabel 1.2 Keadaan KIC (Kaesong Industrial Complex)*

Tahun	Jumlah Perusahaan yang beroperasi	Jumlah Tenaga Kerja Korsel	Jumlah Tenaga Kerja Korut	Jumlah Nilai Produksi
2008	93 Buah	1.055 Jiwa	38.931 Jiwa	459.900.000 USD
2014	123 Buah	800 Jiwa	54.200 Jiwa	2.600.000.000 USD

Sumber: Dhietya Prasetya, 2014. "Latar Belakang Pemutusan Hubungan Kerjasama Industri Korea Utara dengan Korea Selatan di Distrik Kaesong". *Tesis*. UPN "Veteran" Yogyakarta. Halaman 5.

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan KIC memiliki prospek yang baik bagi kedua Korea, perbandingan tahun 2008 hingga tahun 2014 sangat signifikan dalam peningkatan Jumlah Nilai Produksinya. Dari tabel ini juga bisa dikatakan dengan adanya Industri Korea Selatan di Korea Utara ini sebenarnya memiliki pengaruh positif untuk kedua belah pihak.

Meskipun kepemimpinan Korsel sudah berganti hingga kini Korsel dibawah kepemimpinan Presiden ke 11 yaitu Presiden Park Geun Hye, Industri Kaesong masih tetap dipertahankan menjadi kawasan kerjasama yang menjembatani hubungan dua Negara Korea ini. Dibawah kepemimpinan Presiden Park sendiri, Kaesong dapat bertahan menjadi kerjasama yang menguntungkan dan membangun perekonomian Korea

Utara serta menjadi pendorong jalannya Reunifikasi. Upaya ini merupakan sebuah lanjutan dari upaya reunifikasi pada masa pemerintahan presiden Kim Dae-Jung yang mengusung kerjasama ekonomi demi membangun ekonomi kedua Negara Korea serta sebagai simbol penghubung Korea Utara dengan Dunia luar.

Namun, seiring berjalannya waktu dengan adanya ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea belakangan ini membuat aktivitas Industri di Kaesong menjadi terganggu. Ketegangan yang terjadi antara kedua Negara ini memuncak setelah adanya keputusan dari Korea Selatan yang memutuskan untuk menghentikan kegiatan dikompleks industri yang dioperasikannya bersama Korea Utara pada 10 Februari 2016. Selain menutup kawasan Industri ini, Pemerintah Korea Selatan menghentikan pasokan listrik dan air ke kawasan industri Kaesong. Hal ini dilakukan Korsel terkait adanya pelanggaran oleh Korea Utara terhadap upaya Reunifikasi yang awalnya sudah di sepakati oleh kedua Negara ini.

Adanya penutupan Industri Kaesong yang dilakukan oleh Korea Selatan berdampak besar bagi prospek kegiatan Kompleks Industri Korea. Sikap tegas Korea Selatan tersebut semakin meningkatkan ketegangan antar Korea, memicu kemarahan Korea Utara dalam pernyataan bahwa keputusan yang diambil korea selatan merupakan suatu pernyataan perang. Meskipun terjadi peningkatan ketegangan, keputusan Korea Selatan menghentikan operasi Kaesong ini tidak diduga, mengingat upaya-upaya reunifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Korea Selatan.



## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk membuktikan jawaban dari rumusan masalah dan membuktikan hipotesa dengan kerangka pemikiran, data, serta fakta yang relevan sesuai dengan yang penulis lampirkan.
2. Untuk mengetahui dan juga menjelaskan penyebab penutupan KIC (Kaesong Industrial Complex) yang dilakukan oleh Korea Selatan.

## **C. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang hubungan Korea Selatan dan Korea Utara dalam kerjasama Kawasan Industri Kaesong yang sudah dijabarkan, rumusan masalah yang muncul yaitu :

“Mengapa Korea Selatan Menutup Kawasan Kerjasama Industri Kaesong (Kaesong Industrial Complex) Pada Masa Pemerintahan Park Geun Hye Tahun 2016?”

## **D. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk membantu penulis dalam menjawab serta menganalisa pokok permasalahan yang terdapat pada tulisan tersebut penulis memerlukan kerangka dasar pemikiran dengan menggunakan konsep dan teori yang mendukung penulisan karya tulis ini. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan :

## 1. Model Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri

Menganalisis suatu politik luar negeri merupakan bentuk usaha untuk menyelidiki suatu fenomena yang kurang lebih melibatkan kehidupan internal (aspirasi, atribut, budaya, konflik, kapabilitas, institusi dan rutinitas) dan eksternal dari sekelompok masyarakat yang berusaha untuk memperoleh dan menjaga identitas sosial, hukum dan geografis, sebagai sebuah bangsa. Menurut Coplin, untuk dapat memahami konteks mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka, kita harus memahami apa yang melatar belakangi para pemimpin mereka dalam membuat keputusan.

Menurut pemikiran William D. Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau Foreign policy, Yaitu :<sup>8</sup>

*“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :*

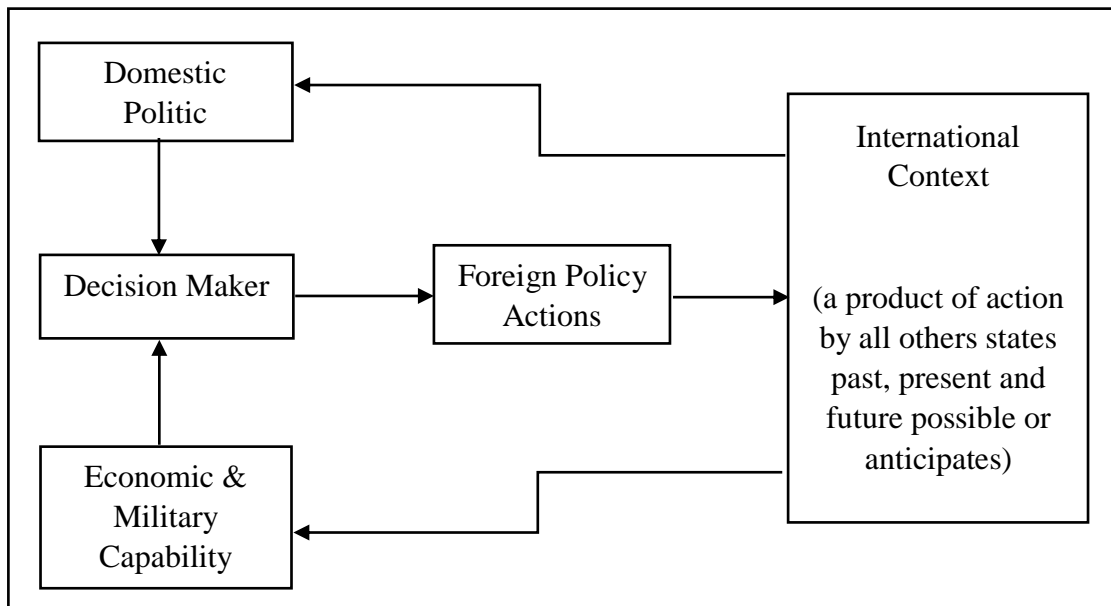
- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya.*
- b. Situasi Ekonomi dan Militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.*
- c. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. “*

---

<sup>8</sup> William D. Coplin. 1992. Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis. Bandung; Sinar Baru. Halaman 30.

Penjelasan Coplin diatas lebih jelasnya dapat dilihat dengan diagram teori pembuatan kebijakan politik luar negeri, pada bagan dibawah ini:<sup>9</sup>

*Bagan 1.1 Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Coplin*



*Sumber : William D. Coplin. 1992. Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis. Bandung; Sinar Baru*

Dari gambar atau bagan diatas, penulis gambarkan aplikasi teori William D.Coplin tersebut pada fokus penelitian yang diletakkan pada kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer dan konteks Internasional, ketiga faktor tersebut memang sesuai dengan apa yang melandasi munculnya kebijakan Korea Selatan akan penutupan Industri Kaesong. Dimana kondisi politik dalam negeri, kepentingan ekonomi - militer dan faktor konteks Internasional sangat mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan Luar Negeri. Jika dilihat

<sup>9</sup> William D.Coplin. Loc.cit

dari situasi politik dalam negeri, kerangka konseptual untuk politik dalam negeri ini berfokus pada kolerasi antar pengambil keputusan (decision makers) dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Aktor-aktor politik tersebut disebut dengan “policy influences” (yang mempengaruhi kebijakan). Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri ini dengan para pengambil keputusan disebut ”*policy influences system*” (sistem pengaruh kebijakan).<sup>10</sup>

#### a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Pengambilan keputusan Korea Selatan dalam kebijakannya atas penutupan kawasan Industri Kaesong ini didorong oleh kondisi politik dalam negeri. Proses pembuatan kebijakan luar negeri pada masa presiden Park Geun Hye berlangsung dalam konteks penutupan kawasan industri Kaesong tidak lagi hanya didominasi oleh Presiden namun juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan masyarakat.<sup>11</sup>

Adanya uji coba nuklir oleh korea Utara sendiri mendapat respon yang keras dari masyarakat Korea Utara. Dengan tindakan Korut yang mengancam keamanan ini, sekitar 150 orang berkumpul di pusat kota Seoul pada 7 Januari 2016 untuk memprotes [uji coba bom hidrogen](#) yang

---

<sup>10</sup> Sri Rahayu. 2010. “Kebijakan Luar Negeri Mesir Membuka Jalur Rafah Secara Kondisional Pasca Kasus Mavi Marmara”. *Skripsi*. FISIPOL, Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halaman 11

<sup>11</sup> Sri Rahayu. *Skripsi*, Loc.cit

dilakukan oleh Korea Utara. Mereka membakar patung pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan merobek bendera Korea Utara. Aksi Protes ini sendiri dilakukan juga sebagai bentuk warga Korsel dalam menuntut pemerintah Korea Selatan untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap Korea Utara.<sup>12</sup> Peristiwa aksi protes ini digunakan oleh Presiden Park untuk mengupayakan kerja sama antara partai konservatif yang ia pimpin dengan partai-partai liberal dalam menangani ancaman nuklir Pyongyang.<sup>13</sup>

#### b. Kondisi Ekonomi Dan Militer

Provokasi Korea Utara baru-baru ini menekan keadaan perekonomian Korea Selatan. Adanya ketegangan di semenanjung Korea yang disebabkan oleh uji coba nuklir dan provokasi rudal Korea Utara dapat menjadi beban yang lebih besar pada perekonomian Korea Selatan.<sup>14</sup> Dengan adanya ketegangan di semenanjung Korea hal ini membuat para pemegang saham Korea Selatan khawatir karena melihat adanya kondisi tersebut yang kemungkinan besar dapat

---

<sup>12</sup> Bbc.com, "Protes Warga Korea Selatan terhadap Bom Korea Utara" diakses pada tanggal 10 Desember 2016. Diakses melalui laman [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160107\\_dunia\\_korsel\\_korut](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160107_dunia_korsel_korut)

<sup>13</sup> Trenmedia.co.id, "Presiden Korsel akan gelar rapat bahas ancaman nuklir korut" diakses pada tanggal 10 Desember 2016, diakses melalui laman <https://trenmedia.co.id/dunia/presiden-korsel-gelar-rapat-bahas-ancaman-nuklir-korut>

<sup>14</sup> Centuryrealtime.com, "Ketegangan Geopolitik Menekan Perekonomian Korea Selatan" diakses pada tanggal 5 Mei 2017, diakses melalui laman <http://www.centuryrealtime.com/berita-analisis/komoditi/22-news/vibeconomibusiness/17373-Ketegangan%20Geopolitik%20Menekan%20Perekonomian%20Korea%20Selatan>

mengancam kegiatan di semenanjung Korea. Tidak hanya dalam ekonomi, namun provokasi ini mengancam militer Korea Selatan, dengan provokasi tersebut Korea Utara terus mengatakan bahwa akan terus mengembangkan program nuklirnya yang dapat menjadi ancaman besar bagi negara tetangganya tersebut. Korut menegaskan, pengembangan program nuklir dilakukan dengan tujuan untuk pertahanan diri sendiri.<sup>15</sup> Keadaan ini kemudian membuat Presiden Park memutuskan untuk memanggil sejumlah pejabat senior guna meninjau strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.<sup>16</sup>

### c. Konteks Internasional

Faktor Ketiga dari konsep ini adalah konteks Internasional. Konteks Internasional sendiri adalah situasi dimana suatu negara melaksanakan politik luar negerinya dan bertujuan untuk mempengaruhi negara–negara lain. Dengan peluncuran missil oleh Korea Utara ini membuat keamanan dunia Internasional ikut terancam dan juga membuat Korea Utara melanggar sanksi yang sebelumnya pernah di berikan oleh PBB.

---

<sup>15</sup> Bbc.com, “Korut 'siap tenggelamkan' kapal induk Amerika Serikat” diakses pada 5 Mei 2017, melalui laman <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39687230>.

<sup>16</sup> Trenmedia.co.id, “Presiden Korsel akan gelar rapat bahas ancaman nuklir korut” diakses pada tanggal 10 Desember 2016, diakses melalui laman <https://trenmedia.co.id/dunia/presiden-korsel-gelar=rapat-bahas-ancaman-nuklir-korut>

## 2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional atau National Interest adalah konsep yang digunakan para pengambil keputusan (*decision makers*) sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara. Selain untuk menjelaskan perilaku, Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "Kepentingan Nasional".<sup>17</sup>

Kepentingan Nasional (*National Interest*) sendiri sebenarnya adalah sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu Negara yang mana negara tersebut memiliki kebutuhan atau suatu hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan tujuan nasional. Kepentingan nasional yang dimiliki tiap negara berbeda-beda tergantung kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi negara tersebut.

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (*National Interest*) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu

---

<sup>17</sup> T.May Rudy, 2002. Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin. Bandung; Refika Aditama. Halaman 116

paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II.<sup>18</sup> Menurutnya Kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Kekuasaan tidak akan tercapai tanpa adanya kekuatan nasional dan politik suatu negara tidak lepas dari kepentingan nasional, karena tujuan politik luar negeri adalah mencari, mempertahankan, dan memperkuat kepentingan nasional.<sup>19</sup>

Selain Morgenthau, Jack C Plano dan Roy Olton juga menjabarkan konsep kepentingan nasional. Yang mana kepentingan nasional oleh Jack C. Plano dan Roy Olton diberi batasan sebagai berikut:

*“Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan (Decision Making) dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi Negara untuk mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, kemandirian, ketuhanan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi”<sup>20</sup>*

---

<sup>18</sup> Mochtar Mas'ood, 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta; LP3ES. Halaman 140

<sup>19</sup> Tulus Warsito, 1998. Teori-teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya, Yogyakarta; Bigraf. Halaman 29

<sup>20</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton. 1969. International Relations Dictionary. USA: Rinehart and Wingston, Inc. Halaman 128. Dalam skripsi “Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Mempertahankan Proyek Namru-2 Di Indonesia” oleh Nur Hasanah. 2010. FISIPOL. Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halaman 8



Jika menurut pemikiran dari Jack C. Plano dan Roy Olton, mereka membagi esensi dari kepentingan nasional kedalam 5 pilar utama yaitu :<sup>21</sup>

- i. Pertahanan diri, hal ini merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan negara dalam memelihara keberadaan identitas, serta nilai-nilai yang dimiliki guna mempertahankan eksistensi negaranya.
- ii. Kemerdekaan, hal ini merupakan sebuah wujud masa depan dari suatu negara yang bebas dari dominasi atau intervensi asing sehingga dapat menentukan masa depannya serta menyelenggarakan pemerintahan secara efektif.
- iii. Integritas wilayah, hal ini merupakan kepentingan yang sangat penting karena integritas dapat menjamin sebuah kesinambungan bernegara dengan sebuah wujud kesatuan yang saling mendukung antara wilayah satu dengan yang lainnya.
- iv. Keamanan, hal ini merupakan faktor penting sebagai alat utama pertahanan suatu negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam dan luar negeri,serta untuk menjaga dan mewujudkan stabilitas dalam negeri. Selain itu, keamanan merupakan prasyarat bagi pertumbuhan

---

<sup>21</sup> Jack C. Plano and Ray Olton, *The International Relations Dictionary*, Third Edition, Western Michigan University ( ABL-Clio, California 1980 ) hal 27. Dalam Tesis "*Intervensi Arab Saudi dalam Meredam Gerakan Reformasi di Bahrain*" oleh Allan Ankara Ginting Munthe. 2016. FISIP UNPAS. Halaman 16

perekonomian, khususnya yang melibatkan aktor-aktor luar negeri.

- v. Kesejahteraan ekonomi, hal ini merupakan factor penting karena ekonomi merupakan variabel penting yang turut menentukan kemajuan suatu negara. Selain itu, ekonomi juga menjadi faktor dominan dalam menentukan citra suatu negara di mata internasional.

Dari 5 pilar yang diuraikan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton faktor keamanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan Korea Selatan dalam kasus penutupan Industri Kaesong. Korea Selatan menggunakan keamanan sebagai alat utama pertahanan negaranya dari ancaman nuklir Korea Utara. Korea Selatan menerapkan kebijakannya dengan menutup industri untuk menjaga dan mewujudkan stabilitas dalam negerinya. Penutupan Kaesong merupakan kepentingan nasional Korea Selatan untuk menjaga keamanan domestik negaranya dari ancaman yang terjadi, seperti adanya tindakan provokatif Korea Utara yang menembakkan rudal misil balistik.

Sikap provokasi Korea Utara ini dinilai sebagai pelanggaran isi dari Reunifikasi pada masa Presiden Park yang mengusung tentang *Trust-Building Process*. *Trust Building Process* ini merupakan sebuah upaya dari Korea Selatan untuk menciptakan keamanan di semenanjung Korea. Upaya ini dilakukan agar menciptakan adanya

kepercayaan antar kedua Negara dalam bekerjasama tanpa adanya rasa curiga dan ketakutan akan adanya ancaman serangan nuklir maupun serangan militer.

Korea Selatan memiliki kepentingannya untuk melindungi Negaranya dari adanya gangguan atau ancaman dari negara tetangganya. Korea Selatan mengeluarkan kebijakannya terhadap Korea Utara untuk mempertegas kekuasaan Negaranya dengan menutup Industri Kaesong yang menjadi proyek kerjasama kedua Negara itu.

#### **E. Hipotesa**

Dari rumusan masalah serta pemaparan dari kerangka dasar pemikiran yang sudah dikemukakan, maka hipotesis penutupan Kawasan Industri Kaesong oleh pihak Korea Selatan karena :

1. Situasi politik yang tidak stabil di Korea Selatan yang ditandai oleh adanya demonstrasi yang terjadi, keadaan perekonomian Korea Selatan yang menurun, serta konteks internasional dimana terjadi pelanggaran Korea Utara atas sanksi PBB.
2. Adanya tindakan provokatif dari Korea Utara yang mengancam keamanan Korea Selatan.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi penulisan, penulis memfokuskan jangkauan penelitian ini pada pembahasan mengenai Kebijakan Korea Selatan dalam Penutupan Industri Kaesong dan penulisan akan mengambil jangka waktu

dari masa pemerintahan Park Geun Hye tahun 2013 sampai tahun 2016. Namun juga tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan peristiwa yang terjadi di luar kurun waktu penelitian yang masih relevan dengan peristiwa tersebut.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian pada penulisan ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa yang dilakukan tidak menggunakan data statistik. Kalau pun ada data angka atau tabel digunakan hanya sebagai pendorong dari penelitian atau memperjelas kualitas penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis dari penelitian ilmiah. Untuk lebih spesifik tentang metode yang dilakukan, penulis menggunakan Metode *Library Research* untuk menyusun penelitian ini dengan mempelajari buku-buku mengenai studi sejarah hubungan Korea Selatan dan Korea Utara, Jurnal mengenai Kawasan Industri Kaesong, dan menggunakan beberapa sumber dari media massa seperti surat kabar, internet, jurnal, majalah, artikel, makalah, isi seminar dan beberapa materi perkuliahan yang telah didapatkan saat mengikuti perkuliahan.